

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Gereja Kristen Indonesia (GKI)

Gereja Kristen Indonesia (GKI) merupakan sebuah bentuk golongan gereja Kristen Protestan yang berdiri di Indonesia. Gereja Kristen Indonesia pada mulanya merupakan sebuah gereja dengan nama *Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH)* di mana gereja tersebut menggunakan bahasa *Hokian*. Gereja Kristen Indonesia saat ini memiliki 228 gereja, 19 klasis dan 3 sinode wilayah yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Selain itu, Gereja Kristen Indonesia juga bergerak pada badan pelayanan berupa pendidikan dan memiliki kerja sama dengan badan pendidikan di Indonesia salah satunya adalah BPK Penabur, Yayasan Pendidikan Budya Wacana Yogyakarta, Universitas Kristen Maranata, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Petra, Yayasan Pendidikan Kristen Saint John Jakarta dan lain-lain. Gereja Kristen Indonesia disusun menggunakan sistem gereja *presbiterial-sinodal* yang mencakup 4 lingkup gerejawi (Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, 2009) :

1. Jemaat/Gereja

Merupakan lingkup dasar kesatuan Gereja Kristen Indonesia. GKI dipimpin oleh Badan Pelaksana Majelis Jemaat (BPMJ) yang terdiri dari penatua dan pendeta.

2. Klasis

Merupakan lingkup kesatuan Gereja Kristen Indonesia yang hadir melaksanakan misinya pada suatu wilayah tertentu dan merupakan persekutuan dari keseluruhan jemaat di wilayah tertentu.

3. Sinode Wilayah

Merupakan lingkup gabungan dari keseluruhan klasis di suatu wilayah tertentu.

4. Sinode

Lingkup terbesar dari Gereja Kristen Indonesia yang berisi gabungan dari keseluruhan sinode wilayah.

2.2. Gereja Kristen Indonesia Ngupasan Yogyakarta

2.2.1. Sejarah Gereja Kristen Indonesia Ngupasan Yogyakarta

Gereja Kristen Indonesia Ngupasan Yogyakarta (GKIN Yogyakarta) merupakan Gereja Kristen Indonesia tertua yang berdomisili di Yogyakarta yang pada mulanya merupakan gereja etnis *Tionghoa*. GKI Ngupasan Yogyakarta berdiri pada tanggal 3 Juni 1934. Lokasi GKI Ngupasan berada pada Jalan Bayangkara No. 25, Ngampilan. GKI Ngupasan merupakan gereja yang memprakarsai beberapa GKI lainnya di Yogyakarta seperti GKI Wongsodirjan, GKI Gondomanan, GKI Gejayan, GKI Pos Palagan dan GKI Adisucipto.

Gereja Kristen Indonesia Ngupasan memiliki berbagai badan pelayanan yang bergerak di bidang pendidikan khususnya dalam mendirikan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Nasional (YPPN) Budya Wacana dan dalam bidang kemasyarakatan dengan mendirikan Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM) Pelita Kasih. GKI Ngupasan merupakan gereja yang bersifat Inklusif di mana gereja ini menerima kerja sama dari berbagai lembaga seperti Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), RS Bethesda, LPP Sinode GKJ dan GKI.

Visi dari GKI Ngupasan adalah “Menjadi Keluarga Kristus yang AKRAB – Apresiatif, Kreatif, Responsif, Akuntabel dan Bermisi”. Sedangkan, misi dari GKI Ngupasan adalah sebagai berikut :

1. Mengarahkan hidup bergereja bagi kemuliaan Allah.
2. Menghidupi relasi keluarga Kristus dalam semangat apresiatif dan partisipatif.
3. Membangun komunitas pembelajar yang kreatif dan inovatif dalam menghidupi Firman Tuhan.
4. Mengembangkan semangat responsif dan bermisi baik dalam hidup berjemaat maupun dalam hidup bermasyarakat.
5. Mewujudkan akuntabilitas kepemimpinan yang transparan dan bersahabat.

2.2.2. Struktur Organisasi

GKI Ngupasan memiliki struktur organisasi yang berbentuk horizontal

dan vertikal. GKI Ngupasan memiliki struktur organisasi yang di namakan Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) atau dapat disingkat dengan Majelis Jemaat (MJ). Dalam menjalankan tugasnya BPMJ akan dibantu oleh kantor gereja serta Badan Pelayanan (BAPEL). Dalam struktur BPMJ terdapat 5 bidang majelis di antaranya sebagai berikut :

1. Bidang Ibadah

Bidang yang berfokus dan bertanggung jawab atas segala bentuk peribadatan.

2. Bidang Pelayanan

Bidang yang bergerak dalam kegiatan nyata pada masyarakat luas seperti kegiatan pengobatan gratis.

3. Bidang Pembinaan

Bidang yang bertugas untuk mengatur setiap badan pelayanan atau komisi seperti komisi anak hingga komisi orang lanjut usia (orlansia).

4. Bidang Penatalayanan

Bidang yang berfokus dalam perawatan maupun pembelian yang berkaitan dengan gedung maupun peribadatan.

5. Bidang Kesaksian

Bidang yang bertugas untuk mengatur persekutuan wilayah serta tim doa, persekutuan doa umum (PDU) dan bidston pagi.

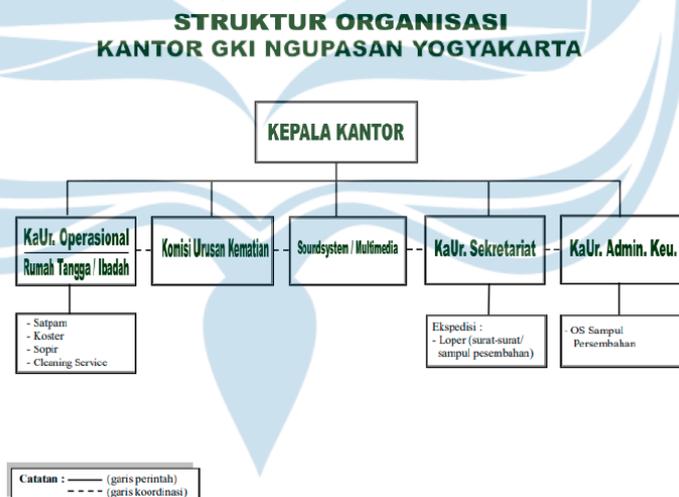
Selain memiliki 5 bidang BPMJ, GKI Ngupasan juga terdiri dari 5 komisi seperti :

1. Komisi Anak (usia 3 hingga 12 tahun atau setara dengan TK sampai SD)
 2. Komisi Pra Remaja (usia 12 hingga 14 tahun atau setara dengan kelas 1 dan 2 SMP)
 3. Komisi Remaja (usia 14 – 18 tahun atau setara dengan kelas 3 SMP hingga 3 SMA)
 4. Komisi Kaum Muda (usia 19-24 tahun atau setara dengan mahasiswa)
 5. Komisi Oransia
- GKI Ngupasan juga memiliki komunitas atau tim pendukung seperti
1. Tim Multimedia (Termasuk dalam bidang Ibadah)
 2. Tim Dekorasi Ibadah Gerejawi / TDIG (Termasuk dalam bidang Ibadah)
 3. Komisi Kesenian dan Musik Gerejawi / KKMKG (Termasuk dalam bidang ibadah)
 4. Tim Pengobatan Gratis (Termasuk dalam bidang pelayanan)
 5. Tim Doa Senin (Termasuk dalam bidang kesaksian)
 6. Tim Doa Sabtu Pagi (Termasuk dalam bidang kesaksian)
 7. Persekutuan Doa Umum (Termasuk dalam bidang kesaksian)
 8. Bidston Pagi (Termasuk dalam bidang kesaksian)
 9. Komunitas Kapal Naga /NITASKANA (Termasuk dalam bidang kesaksian)
 10. Paduan Suara Gloria (Termasuk dalam bidang ibadah)

11. Paduan Suara Maranatha (Termasuk dalam bidang ibadah)
12. Paduan Suara *Chiesa Voice* (Termasuk dalam bidang ibadah)
13. Paduan Suara Syalom (Termasuk dalam bidang ibadah)

GKI Ngupasan memiliki 10 wilayah cakupan yang tersebar di area Yogyakarta seperti wilayah Pringgokusuman, wilayah Notoyudan, wilayah Ngampilan, wilayah Kraton, wilayah Gondomanan, wilayah Yogya Barat, wilayah Yogya Selatan, wilayah Yogya Tengah, wilayah Tegalrejo dan wilayah Umbulharjo.

Kantor GKI Ngupasan Yogyakarta juga memiliki struktur organisasi yang berdiri sendiri atau terlepas dari BPMJ seperti badan bagan dibawah ini :



2.3. Harta Milik Gereja Kristen Indonesia

2.3.1. Harta Milik

Harta milik Gereja Kristen Indonesia diatur dalam buku Tata Gereja

dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (2009). Harta milik Gereja Kristen Indonesia yang tercantum dalam bab XLVI pasal 205 adalah sebagai berikut :

1. Uang dan surat – surat berharga.
2. Barang – barang bergerak, antara lain kendaraan, mesin-mesin, inventaris kantor, alat – alat musik dan peralatan lainnya.
3. Barang – barang tidak bergerak, antara lain tanah, gedung gereja, pastori, balai pertemuan, kantor tata usaha dan bangunan – bangunan lainnya.
4. Kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, hak paten, dan hak merek.

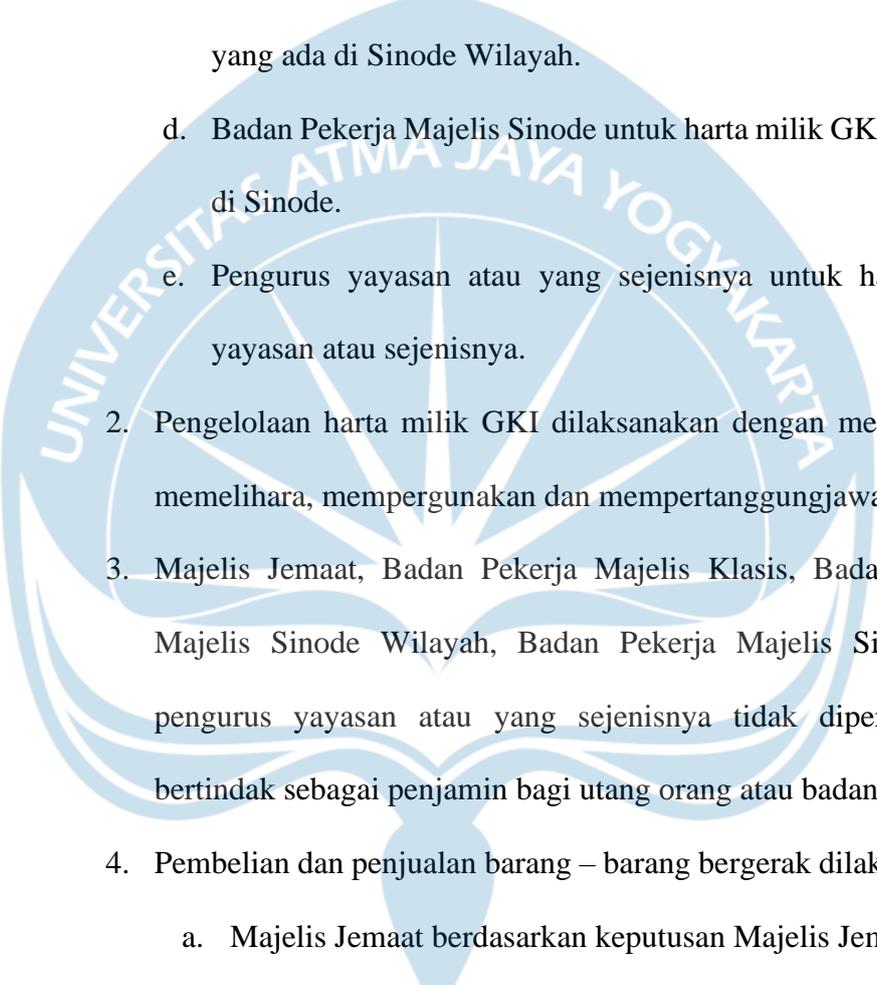
Sedangkan mengenai perolehan harta milik GKI tercantum pada pasal 206 mengenai perolehan berupa :

1. Persembahan anggota.
2. Sumbangan – sumbangan atau hibah yang tidak mengikat.
3. Usaha – usaha lain.

2.3.2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Harta Milik

Pengelolaan Harta Milik GKI diatur dalam Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (2009). Berikut Pengelolaan Harta milik Gereja Kristen Indonesia yang tercantum dalam bab XLVI pasal 209 :

1. Pengelolaan harta milik GKI dilaksanakan oleh :

- 
- a. Majelis jemaat untuk harta milik GKI yang ada di Jemaat.
 - b. Badan Pekerja Majelis Klasis untuk harta milik GKI yang ada di Klasis.
 - c. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah untuk harta milik GKI yang ada di Sinode Wilayah.
 - d. Badan Pekerja Majelis Sinode untuk harta milik GKI yang ada di Sinode.
 - e. Pengurus yayasan atau yang sejenisnya untuk harta milik yayasan atau sejenisnya.
2. Pengelolaan harta milik GKI dilaksanakan dengan mengadakan, memelihara, mempergunakan dan mempertanggungjawabkannya.
 3. Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Klasis, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode dan pengurus yayasan atau yang sejenisnya tidak diperkenankan bertindak sebagai penjamin bagi utang orang atau badan lain.
 4. Pembelian dan penjualan barang – barang bergerak dilakukan oleh
 - a. Majelis Jemaat berdasarkan keputusan Majelis Jemaat.
 - b. Badan Pekerja Majelis Klasis berdasarkan keputusan Badan Pekerja Majelis Klasis.
 - c. Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah berdasarkan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah.
 - d. Badan Pekerja Majelis Sinode berdasarkan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode.

5. Pembelian atau penjualan barang – barang tidak bergerak dapat dilakukan oleh Majelis Jemaat, Majelis Klasis, Majelis Sinode Wilayah dan Majelis Sinode dengan prosedur yang tertera dalam Bab XLVI Harta Milik Pasal 209.

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban harta milik GKI tercantum pada pasal 210 berupa :

1. Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Klasis, Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah, dan Badan Pekerja Majelis Sinode serta pengurus yayasan atau yang sejenisnya wajib membuat laporan pertanggung-jawaban pengelolaan harta milik GKI yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat sekurang – kurangnya satu tahun sekali.
3. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi rencana dan realisasi anggaran belanja dan pendapatan, serta daftar inventaris.

2.4. Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori Institusional (*Institutional Theory*) dapat dikatakan sebagai sebuah pemahaman terbentuknya suatu organisasi maupun kelompok yang dilatar belakangi oleh suatu tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya sebuah institusionalisasi. Zukler (1987) dalam Donaldson (1995) mengungkapkan bahwa ide maupun gagasan pada sebuah

lingkungan institusional yang akan membentuk bahasa dan simbol yang menjelaskan suatu keberadaan organisasi dan diterima (*taken for granted*) sebagai sebuah norma dalam konsep organisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Meyer dan Scott (1983) dalam Donaldson (1995) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi berada di bawah tekanan yang berasal dari berbagai kekuatan sosial yang berguna untuk melengkapi serta menyelaraskan sebuah struktur, organisasi harus melakukan kompromi dan memelihara struktur operasional secara terpisah, dikarenakan struktur organisasi tidak ditentukan oleh sebuah situasi lingkungan tugas melainkan oleh situasi masyarakat secara umum di mana sebuah organisasi ditentukan oleh legitimasi, efektivitas serta rasionalitas pada masyarakat.

Teori institusional mengungkapkan bahwa perilaku suatu organisasi ditentukan oleh lingkungan sekitar seperti norma atau nilai yang berkembang di lingkungan organisasi tersebut maupun lingkungan masyarakat di luar organisasi. Sebuah Transparansi merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dari sebuah organisasi. Dalam mewujudkan tindak transparansi sebuah organisasi akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal dalam mewujudkan transparansi dapat berupa komitmen organisasi yang di mana akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi anggota organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal dapat berupa pengendalian internal dan akuntabilitas di mana anggota organisasi akan menghadapi tuntutan dari masyarakat, aturan dan *stakeholder*.

2.5. Transparansi

Hood (2007) mendeskripsikan transparansi sebagai suatu konsep yang mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka mengenai *input, output* maupun *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka mengenai transformasi yang berlangsung antara *input, output* maupun *outcome*), transparansi *real-time* (sebuah informasi yang dimuat segera), atau transparansi *retrospektif* (informasi yang tersedia berlaku surut).

Selain itu, Silver (2005) mengungkapkan argumennya bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan. Transparansi pada organisasi non publik maupun publik akan meminimalkan kesalahpahaman informasi yang diterima oleh pihak internal serta eksternal. Kreitner & Kinicki (2005) menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam pengelolaan sumber daya.

Berikut adalah indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan transparansi pelaporan keuangan menurut Krina (2003) :

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan dalam mengakses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan.
4. Meningkatkan arus informasi.

2.6. Komitmen Organisasi

2.6.1. Definisi Komitmen Organisasi

Hahn *et al.*, (1992) mengungkapkan bahwa salah satu metode dalam meningkatkan pengolahan informasi dapat menggunakan tingkat keterlibatan anggota di mana keterlibatan anggota berkaitan dengan komitmen organisasi mereka. Komitmen Organisasi (*Organization Commitment*) menurut Meyer & Allen (1997) adalah sebuah komitmen yang dipandang dapat merefleksikan sebuah orientasi afektif terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan beban moral untuk terus berada dalam organisasi tersebut.

Ratifah (2012) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Menurut Ratifah (2012) jika pekerja memiliki rasa terikat dengan nilai – nilai organisasi yang ada maka pekerja tersebut akan merasa senang dalam bekerja sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi serta dapat termotivasi melaporkan seluruh aktivitas organisasi dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangan melalui laporan keuangan.

2.6.2. Komponen Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi menurut Meyer & Allen (1997) terbagi menjadi

tiga komponen organisasi yaitu :

1. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*) berkaitan dengan rasa ingin menjadi bagian dari organisasi tersebut dikarenakan adanya sebuah ikatan emosional atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi tersebut.
2. Komitmen Kontinuan (*Continuance Commitment*) berkaitan dengan rasa tetap bertahan dalam organisasi dikarenakan tidak menemukan pekerjaan lain atau dikarenakan adanya *rewards* ekonomi tertentu.
3. Komitmen Normatif (*Normative Commitment*) berkaitan dengan adanya kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya.

2.7. Pengendalian Internal

Menurut Romney (2014) pengendalian internal didefinisikan sebagai proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Sinaga (2019) menjelaskan bahwa pengendalian internal sebagai suatu proses untuk melakukan pengawasan, pengarahan, dan pengukuran sumber daya suatu organisasi dan mempunyai peran sebagai pencegah dan pendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) serta penyimpangan.

Beberapa faktor pengendalian internal yang perlu diterapkan suatu organisasi agar dapat berjalan dengan efektif antara lain (Mulyadi, 2009) :

1. Memiliki struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional dengan tegas.
2. Sistem wewenang serta prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup mengenai kekayaan, utang, pendapatan serta biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan dengan mutu sesuai dengan tanggung jawab.

2.8. Akuntabilitas

Menurut Krina (2003) akuntabilitas berhubungan erat dengan suatu kewajiban dari sebuah organisasi pemerintahan maupun para pekerja internal organisasi tersebut untuk menyusun sebuah kebijakan maupun melaksanakan sebuah aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku serta kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas suatu organisasi publik mengharuskan setiap anggota organisasinya bertanggung jawab atas penggunaan keuangan maupun sumber daya publik. Prinsip akuntabilitas menurut Krina (2003) adalah suatu ukuran yang dapat menunjukkan seberapa besar kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan nilai maupun norma eksternal yang dimiliki oleh *stakeholders* yang memiliki kepentingan dengan hal tersebut.

Adapun tahapan akuntabilitas menurut Krina (2003) :

1. Proses pembuatan keputusan :
 - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dilaksanakan secara

tertulis dan tersedia bagi setiap masyarakat yang membutuhkan.

- b. Pembuatan keputusan sudah berdasarkan standar etika dan nilai yang berlaku, artinya berdasarkan prinsip administrasi yang benar maupun nilai yang berlaku pada *stakeholders*.
- c. Memiliki kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan memiliki keselarasan dengan visi dan misi, serta standar yang berlaku.
- d. Memiliki mekanisme untuk menjamin bahwa standar yang digunakan telah terpenuhi dan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

2. Tahap sosialisasi kebijakan :

- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, media non massa, maupun media komunikasi personal.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi atas sebuah keputusan yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran program.
- c. Memiliki akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan memiliki mekanisme pengaduan masyarakat.

- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan *monitoring* hasil yang telah dicapai pemerintah.

Pada penelitian ini akan berfokus pada organisasi gereja yang merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan yang mewujudkan akuntabilitas keuangannya melalui laporan dan pelaporan keuangan (PSAK No.45 tahun 2011). Akuntabilitas dalam suatu organisasi seperti gereja meliputi aspek spiritual, sosial, dan keuangan oleh para anggota jemaat beserta pemimpin gereja melalui perilaku (Saerang, 2003). Menurut Ansar & Silvia (2011) akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu organisasi dalam menggunakan serta mengelola dana yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2000) mengungkapkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan serta sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku untuk mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Transparansi

Ratifah (2012) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Menurut Ratifah (2012) jika pekerja memiliki rasa terikat dengan nilai – nilai organisasi yang ada maka pekerja tersebut akan merasa senang dalam bekerja sehingga mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasi serta dapat termotivasi melaporkan seluruh aktivitas organisasi dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangan melalui laporan keuangan. Transparansi merupakan bentuk pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam pengelolaan sumber daya (Kreitner & Kinicki, 2005).

2.9.2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi

Sinaga (2019) menjelaskan bahwa pengendalian internal sebagai suatu proses untuk melakukan pengawasan, pengarahan, dan pengukuran sumber daya suatu organisasi dan mempunyai peran sebagai pencegah dan pendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) serta penyimpangan. Hood (2007) mendeskripsikan transparansi sebagai suatu konsep yang mencakup transparansi peristiwa atau kejadian (informasi yang terbuka mengenai *input*,

output maupun *outcome*), transparansi proses (informasi yang terbuka mengenai transformasi yang berlangsung antara *input*, *output* maupun *outcome*), transparansi *real-time* (sebuah informasi yang dimuat segera), atau transparansi *retrospektif* (informasi yang tersedia berlaku surut).

2.9.3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi

Menurut Krina (2003) akuntabilitas berhubungan erat dengan suatu kewajiban dari sebuah organisasi pemerintahan maupun para pekerja internal organisasi tersebut untuk menyusun sebuah kebijakan maupun melaksanakan sebuah aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku serta kebutuhan masyarakat. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut organisasi untuk lebih transparan (Silver, 2005).

2.10. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaporan keuangan gereja telah banyak diteliti. Penelitian milik Sukmawati et al. (2016) yang berjudul “Akuntabilitas Gereja dalam Perspektif Alkitabiah dan *Stewardship Theory* (Study Kasus pada Gereja X di Jawa Timur) menggunakan variabel dependen akuntabilitas gereja serta variabel independen perspektif alkitab dan *stewardship theory*. Subjek penelitian ini adalah bendahara, pengurus, gembala sidang, dan jemaat Gereja X di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis tematik dan analisa data triangulasi untuk melakukan

analisis data. Penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas gereja bersifat vertikal dan horizontal.

Penelitian lain milik Manguma et al. (2020) mengenai “Mengungkap Praktik Akuntabilitas dalam Organisasi Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu” menggunakan variabel independen praktik akuntabilitas dengan variabel dependen organisasi gereja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan dengan pencatatan yang transparan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan antara agen dan *principal* serta akuntabilitas horizontal sangat dibutuhkan oleh organisasi gereja. Penelitian selanjutnya milik Wibowo & Kristanto (2017) mengenai “Korupsi dalam Pelayanan Gereja : Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal” menggunakan variabel independen potensi penyimpangan dan pengendalian internal serta variabel dependen pelayanan gereja. Penelitian ini menggunakan pengujian statistik Kruskal Wallis. Hasil dalam penelitian ini adalah pengendalian internal sangat diperlukan untuk menuntaskan *fraud* dan pemahaman pengendalian internal juga sangat penting dalam upaya memberantas korupsi.

Penelitian terdahulu dengan variabel independen komitmen organisasi, sistem pengendalian internal dan akuntabilitas juga telah banyak diuji pengaruhnya terhadap transparansi laporan keuangan. Penelitian berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan di Gereja

Paroki Keuskupan Agung Semarang Rayon Yogyakarta Dan Rayon Sleman” yang telah dilakukan oleh Saputra (2020) menggunakan teknik pengujian berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil dari penelitian ini adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, dan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian selanjutnya dengan mengangkat topik “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Simalungun” oleh Sinaga (2019). Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Penelitian selanjutnya mengenai “Partisipasi Masyarakat, Pemahaman dan Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo” yang diteliti oleh Saputri (2020) menggunakan subjek desa – desa pada kecamatan Sentolo. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat, pemahaman dan peran perangkat desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Variabel | Objek | Hasil |
|-------------------------------|---|---|---|
| Sukmawati et al. (2016) | X1 = Perspektif Alkitabiah X2 = <i>stewardship theory</i> Y = Akuntabilitas Gereja | Bendahara, pengurus, gembala sidang, dan jemaat dari gereja X di Jawa Timur | Terdapat 2 akuntabilitas yang ada pada gereja, yakni : 1. Akuntabilitas vertikal kepada Tuhan dengan mengelola kas gereja. 2. Akuntabilitas horizontal berupa upaya penyampaian bendahara kepada jemaat. |
| Manguma et al. (2020) | X = Praktik Akuntabilitas Y = Organisasi Gereja | Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu | Terdapat hasil berupa : 1. Akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk pertanggung- jawaban pihak gereja kepada jemaat dengan pencatatan laporan keuangan. 2. Akuntabilitas transendental atau pertanggung- jawaban kerohanian. 3. Akuntabilitas horizontal berupa pertanggung- |

| Peneliti | Variabel | Objek | Hasil |
|---------------------------|---|--|--|
| | | | jawaban gereja terhadap jemaat |
| Wibowo & Kristanto (2017) | X1 = Potensi Penyimpangan X2 = Pengendalian Internal Y = Korupsi Pelayanan Gereja | Pimpinan Gereja salah satu Sinode Gereja Kristen terbesar di Indonesia | Terdapat hasil berupa : 1. Rapuhnya pengendalian internal gereja dikarenakan tingginya faktor <i>sakralisasi</i> . 2. Pengendalian Internal yang sesuai dengan kebutuhan gereja akan menutup celah terjadinya korupsi. 3. Pemahaman mengenai pengendalian internal sangat berguna untuk mengurangi kasus korupsi yang terjadi di gereja |
| Saputra (2020) | X1 = Gaya Kepemimpinan X2 = Komitmen Organisasi | Gereja Paroki Keuskupan Agung Semarang Rayon Yogyakarta | Terdapat hasil berupa : 1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi |

| Peneliti | Variabel | Objek | Hasil |
|---------------|---|--|--|
| | X3 = Tekanan Eksternal Y = Pelaporan Keuangan | dan Rayon Sleman | pelaporan keuangan gereja. 2. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan gereja. 3. Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan gereja. |
| Sinaga (2019) | X1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 = Sistem Pengendalian Internal Y = Kualitas Laporan Keuangan | Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun | Terdapat hasil berupa : 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD. |

| Peneliti | Variabel | Objek | Hasil |
|----------------|--|---|---|
| | Pemerintah Daerah (Y) | | 3. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD. |
| Saputri (2020) | X1 = Partisipasi Masyarakat X2 = Pemahaman Perangkat Desa X3 = Peran Perangkat Desa Y = Pengelolaan Dana Desa | Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Sentolo | Hasil berupa partisipasi masyarakat, pemahaman perangkat desa, peran perangkat desa dan pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. |

Sumber : Data Primer, 2022

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Transparansi

Menurut Soekidjan (2009) komitmen organisasi adalah suatu penerimaan seseorang terhadap tujuan dan nilai – nilai organisasi dan upaya berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi

tersebut. Ketika organisasi tersebut merupakan organisasi nirlaba maka organisasi tersebut diharapkan memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan dan perlu mengutamakan transparansi dalam menjalankan pelayanan.

Penelitian dari Zeyn (2011) menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Halmawati & Mustin (2015) dengan hasil yang serupa yakni komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Sedangkan pada penelitian Saputra (2020) memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ha₁ : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

2.11.2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi

Pengendalian internal menurut Romney (2014) merupakan proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Suatu organisasi perlu adanya pengendalian internal guna mengurangi beberapa kasus seperti korupsi. Apabila suatu organisasi memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan sejalan dengan bagian dan fungsi sesuai dengan visi dan misi organisasi maka pelaporan keuangan akan berjalan dengan baik dan transparan. Agung &

Gayatri (2018) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal akan mengurangi *fraud* dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Penelitian dari Agung & Gayatri (2018) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan hal yang sama diteliti oleh Sinaga (2019) memperoleh hal yang sama yakni sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ha₂ : Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan

2.11.3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Transparansi

Menurut Mardiasmo (2006) Akuntabilitas publik merupakan kewajiban penerima tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak *mandate*. Akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam pengelolaan keuangan agar terciptanya kepercayaan antara agen dan *principal* (Manguma et al., 2020).

Penelitian Riyanti (2017) mengungkapkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan hal yang sama diteliti oleh Vidyasari & Suryono (2021) memperoleh hal yang sama yakni akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Ha3 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

